



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 A TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 62
TAHUN 2013 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

- a. mengubah nomenklatur Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup;
- b. menambah 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi;

sehingga besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 September 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 26 A TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BESARAN UANG
 PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SKPD	BESARAN UP
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	600.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	600.000.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	250.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	600.000.000,00
5	BAPPEDA	250.000.000,00
6	DISHUBPARBUD	250.000.000,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	130.000.000,00
9	DINSOSNAKERTRANS	200.000.000,00
10	DISPERINDAGKOP	250.000.000,00
11	BPMP2T	85.000.000,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	80.000.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.000.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH :	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	100.000.000,00
	BAGIAN HUKUM	100.000.000,00
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	100.000.000,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	85.000.000,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.000.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000,00
	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	50.000.000,00
	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	500.000.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000,00
16	INSPEKTORAT	130.000.000,00
17	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	45.000.000,00
18	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	45.000.000,00
19	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	45.000.000,00
20	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	45.000.000,00
21	DPPKAD	250.000.000,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	260.000.000,00
23	KELURAHAN KRAPYAK KIDUL	10.000.000,00
24	KELURAHAN KRAPYAK LOR	10.000.000,00
25	KELURAHAN KANDANG PANJANG	10.000.000,00
26	KELURAHAN PANJANG WETAN	10.000.000,00

NO	SKPD	BESARAN UP
27	KELURAHAN KRATON LOR	10.000.000,00
28	KELURAHAN DUKUH	10.000.000,00
29	KELURAHAN DEGAYU	10.000.000,00
30	KELURAHAN PABEAN	10.000.000,00
31	KELURAHAN BANDENGAN	10.000.000,00
32	KELURAHAN PANJANG BARU	10.000.000,00
33	KELURAHAN KRADENAN	10.000.000,00
34	KELURAHAN BANYUURIP ALIT	10.000.000,00
35	KELURAHAN BANYUURIP AGENG	10.000.000,00
36	KELURAHAN BUARAN	10.000.000,00
37	KELURAHAN JENGGOT	10.000.000,00
38	KELURAHAN KERTO HARJO	10.000.000,00
39	KELURAHAN KURIPAN KIDUL	10.000.000,00
40	KELURAHAN KURIPAN LOR	10.000.000,00
41	KELURAHAN YOSOREJO	10.000.000,00
42	KELURAHAN DUWET	10.000.000,00
43	KELURAHAN SOKO	10.000.000,00
44	KELURAHAN KEBULEN	10.000.000,00
45	KELURAHAN MEDONO	10.000.000,00
46	KELURAHAN PODO SUGIH	10.000.000,00
47	KELURAHAN SAPURO	10.000.000,00
48	KELURAHAN KERGON	10.000.000,00
49	KELURAHAN BENDAN	10.000.000,00
50	KELURAHAN KRAMATSARI	10.000.000,00
51	KELURAHAN KRATON KIDUL	10.000.000,00
52	KELURAHAN TIRTO	10.000.000,00
53	KELURAHAN TEGALREJO	10.000.000,00
54	KELURAHAN BUMIREJO	10.000.000,00
55	KELURAHAN PRINGLANGU	10.000.000,00
56	KELURAHAN PASIRSARI	10.000.000,00
57	KELURAHAN LANDUNGSARI	10.000.000,00
58	KELURAHAN NOYONTAAN	10.000.000,00
59	KELURAHAN KEPUTRAN	10.000.000,00
60	KELURAHAN KAUMAN	10.000.000,00
61	KELURAHAN SAMPANGAN	10.000.000,00
62	KELURAHAN SUGIHWARAS	10.000.000,00
63	KELURAHAN PONCOL	10.000.000,00
64	KELURAHAN KLEGO	10.000.000,00
65	KELURAHAN GAMER	10.000.000,00
66	KELURAHAN DEKORO	10.000.000,00
67	KELURAHAN KARANG MALANG	10.000.000,00
68	KELURAHAN BAROS	10.000.000,00
69	KELURAHAN SOKOREJO	10.000.000,00

NO	SKPD	BESARAN UP
70	KANTOR KETAHANAN PANGAN	60.000.000,00
71	BPMP2AKB	150.000.000,00
72	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	100.000.000,00
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000,00
74	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN	250.000.000,00
75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.000.000,00
76	KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI	40.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	